

DISERTASI

**MODEL PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH
MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI
KOTA TANGERANG**

*(Planning Model in The Urban Slum Area Arrangements to Reach
Sustainable Development in Tangerang City*

diajukan oleh:

R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA
NIM A033212027



Kepada

**PROGRAM DOKTORAL MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2024**

DISERTASI

MODEL PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI KOTA TANGERANG

disusun dan diajukan oleh:

R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA
A033212027

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal 22 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor



Prof. Dr. Musran Munizu, S.E., M.Si., M.A.P.

NIP. 19750909 200012 1 001

Ko-Promotor



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.

NIP. 19710619 00003 1 001

Ko-Promotor



Dr. Nurdjanah Hamid, S.E., M.Agr.

NIP. 19600503 198601 2 001

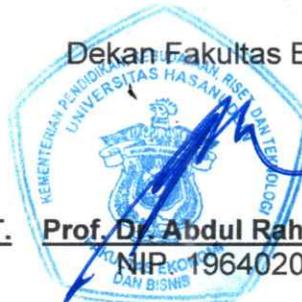
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Muhammad Yunus Amar, S.E., M.T.

NIP. 19601231 198811 1 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si.

NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Sugihharto Achmad Bagdja
No. Induk Mahasiswa : A033212027
Program Studi : Manajemen
Jenjang Pendidikan : Doktor (S3)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Unhas

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Model Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kota Tangerang.

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

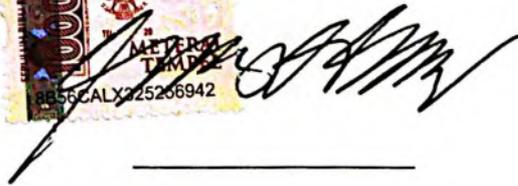
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, / /2024

Yang membuat pernyataan,





KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah SWT, atas berkat limpahan Rahmat dan HidayahNya melalui nikmat kesehatan dan nikmat iman dengan adanya kesempatan dengan ilmu yang insya allah bermanfaat sehingga limpahan berkah dan ridhoNya selalu tercurah kepada penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Jungjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman Aamiin ya.

Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelesaian pendidikan Doktor (S3) pada Program Doktoral Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang terdiri dari enam bab yaitu BAB I pendahuluan, BAB II tinjauan pustaka, BAB III kerangka pemikiran, BAB IV metode penelitian, BAB V hasil dan pembahasan, dan BAB VI penutup. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini banyak melibatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir. M.si., CIPM, CWM, CRA, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, atas segala bentuk motivasi dan layanan yang berkualitas selama penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Musran Munizu, SE, M.Si, M.A.P, Promotor sekaligus dosen Universitas Hasanudin dan Promotor yang dengan kesabaran dan keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memberi arahan kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE, M.Si Ko Promotor I sekaligus dosen Universitas Hasanudin yang dengan kesabaran dan keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memberi dukungan kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Nurdjanah Hamid, SE., M.Agr, Ko Promotor II sekaligus dosen Universitas Hasanudin yang dengan kesabaran dan keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Prof. Dr. Nuraeni Kadir, SE. M.Si, dosen dan sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Syamsu Alam, SE, M.Si, dosen dan sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Sumardi, SE, M.Si, dosen dan sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini.
9. Ibu Dr. Fauziah Umar, SE, M.Si Si, dosen dan sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang tidak dapat dengan sabar membimbing dan mendidik selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Doktoral Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
11. Bapak/Ibu pegawai beserta tim akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan kemudahan layanan dalam mengurus kelengkapan dokumen selama proses pendidikan sampai penyelesaian studi.

12. Bapak H. Arief R Wismansyah yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan demi kelancaran dan terselesaikannya disertasi ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa Doktoral Manajemen Universitas Hasanuddin Angkatan 2022 yang senantiasa kompak saling membantu, saling memotivasi selama ini baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi.
14. Bapak/Ibu pegawai beserta staf Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang terutama Rahmi dan Imron Maulana yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan sehingga dapat terselesaikannya disertasi ini
15. Kepada keluarga Wike Widiawati (istri), dan ke 3 (tiga) putra penulis, M. Rakha Achmad Bagdja, M. Ghaisan Ramadhan Achmad Bagdja, M. Agha Adlan Achmad Bagdja yang saya sayangi dengan keikhlasan dan ketulusan serta doa – doanya sehingga dapat terselesaikannya disertasi ini dan semoga menjadi penyemangat ke 3 (tiga) putra kami dalam menggapai cita – citanya kelak.
16. Kepada Teteh, neneng dan keluarga beserta para keponakan yang tidak henti – hentinya mendoakan penulis dengan keikhlasan dan kesabarannya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan disertasi ini.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu, memotivasi serta mendukung sehingga dapat terselesaikannya disertasi ini.

Secara khusus penulis haturkan terima kasih yang sedalam - dalam nya serta rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada almarhum (R.M. UNTUNG SOMAWASITA BIN R. ACHMAD BAGDJA SOMAWASITA) dan al marhumah (EMI SUHAEMI BINTI LAYAT) kedua orang tua telah membesarkan, mengajarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang, karena doa – doanya juga yang dipanjatkan terus-menerus untuk kesuksesan dan kelancaran penulis .

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal ibadah Bapak, Ibu, dan Saudara (i) sekalian serta senantiasa melimpahkan barokah, rahmat, hidayah, dan inayah Nya kepada kita semua. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dunia praktisi serta pembaca sekalian. Aamiin yra.

Makasar, Mei 2024

Penulis,

(R. Sugiharto Achmad Bagdja)

ABSTRAK

Dengan adanya Penataan Kawasan Kumuh oleh Pemerintah Kota Tangerang ternyata tidak otomatis diiringi dengan kemandirian penduduk setempat. KOTAKU mengatakan bahwa luasan kawasan kumuh justru bertambah menjadi 105,31 hektar di tahun 2021. Artinya banyak area kumuh baru yang timbul. Melalui variabel kolaborasi (program, periode dan kinerja aktor) kolaborasi pentahelix dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa program, periode dan kinerja aktor signifikan terhadap performa kolaborasi dengan nilai korelasi Pearson (r value) positif 0,164; 0,352 dan 0,223. Sedangkan nilai mean periode dan kinerja aktor sudah tinggi namun mean program masih rendah. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat Kedaung Baru dan Kedaung Wetan memiliki daya saing rendah. Kolaborasi pentahelix seharusnya tidak hanya terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur, namun secara terintegrasi seluruh aktor terlibat juga dari awal perencanaan sampai masa operasional terhadap sebuah kawasan baru baik secara sistem maupun kelimuan. Untuk itu kajian ini menyatakan bahwa program, periode dan aktor kolaborasi harus terintegrasi dan hal ini disebut sebagai Model Partisipasi Kolaboratif Terintegrasi.

Kata kunci: Pentahelix, Daya Saing, Kawasan Kumuh, Kolaborasi Optimal

ABSTRACT

With the Slum Area Arrangement, both the Central Government and the Tangerang City Government, it is not automatically accompanied by the independence of the local population. KOTAKU said that the slum area had increase to 105.31 hectares in 2021. This means that many new slum areas have emerged. Through the collaborations'variable (programme, period and actor), Pentahelix collaboration's performance has been examined. The results founds that programme, period and actor are significant towards performance of collaboration with Pearson Prodauct Moment Correlation value positifly (r value) 0,164; 0,352 dan 0,223. Meanwhile, Mean scores of period and actor are rebellious and Mean score of programme is Withdrawn. Those are indicated as low competitiveness level of residence in Kedaung Baru and Kedaung Wetan. Collaboration should not only be involved in the planning and construction period, but it is also integrated into all actors involved until the operation period of the new area (slum area arrangement) both systemically and scientifically. This study conducts that collaboration should be integrated between programme, period and actors. This is called as An Integrated Collaborative Participation Model.

Keywords: Pentahelix, Competitiveness, Slum area, Optimal Collaboration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1 Permukiman Kumuh Perkotaan	12
2.1.2 Penataan Wilayah Kumuh Perkotaan	12
2.1.3 Partisipasi dan Kolaborasi	16
2.1.4 Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance)	17
2.1.5 Pembangunan Berkelanjutan	18
2.1.6 Konsep Aktor dalam Pentahelix	20
2.1.7 Konsep Program dalam Pentahelix	24
2.1.8 Konsep Periode dalam Pentahelix	27
2.1.9 Model Kolaborasi Berkelanjutan	28

2.2	Tinjauan Empiris	28
2.2.1	Penerapan Pentahelix.....	28
2.2.2	Kegagalan Penerapan Kolaborasi Pentahelix	30
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN.....		33
3.1	Kerangka Pemikiran.....	33
BAB IV METODE PENELITIAN.....		35
4.1	Rancangan Penelitian.....	35
4.2	Situs dan Waktu Penelitian	36
4.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	36
4.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
4.5	Metode Pengumpulan Data	37
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
4.7	Instrumen Penelitian	39
4.8	Teknik Analisis Data	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		46
5.1	Hasil Penelitian	46
5.1.1	Karakteristik Masyarakat Dan Huniannya yang Termasuk Dalam Dalam Kawasan Kumuh.....	46
5.1.2	Program Kolaborasi Pentahelix yang Ada Di Kedaung Baru (Masyarakat Berdaya Saing)	49
5.1.3	Periode Kolaborasi Pentahelix yang Ada Di Kedaung Baru (Masyarakat Berdaya Saing)	53
5.1.4	Kinerja Masing - Masing Aktor Pentahelix (Masyarakat, Pemerintah, Akademisi, Swasta Dan Media).....	54
5.1.5	Hubungan Antara Program, Periode dan Kinerja Aktor	56
5.2	Pembahasan Penelitian	60
5.2.1	Karakteristik Masyarakat Dan Huniannya yang Termasuk Dalam Dalam Kawasan Kumuh.....	60
5.2.2	Program Kolaborasi Pentahelix yang Ada Di Kedaung Baru (Masyarakat Berdaya Saing)	64

5.2.3 Periode Kolaborasi Pentahelix yang Ada Di Kedaung Baru (Masyarakat Berdaya Saing)	65
5.2.4 Kinerja Masing - Masing Aktor Pentahelix (Masyarakat, Pemerintah, Akademisi, Swasta Dan Media).....	66
5.2.5 Hubungan Antara Program, Periode dan Kinerja Aktor	69
BAB VI PENUTUP	77
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Rekomendasi dan Saran.....	77
6.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dominasi Peran Aktor	28
Tabel 4.1 Instrumen Penelitian	39
Tabel 5.1 Bobot Program Kolaborasi.....	50
Tabel 5.2 Bobot Periode Kolaborasi.....	53
Tabel 5.3 Tingkat Partispasi Periode Kolaborasi.....	54
Tabel 5.4 Bobot Kinerja Aktor Kolaborasi.....	55
Tabel 5.5 Tingkat Partispasi Kinerja Aktor Kolaborasi	56
Tabel 5.6 Crosstabulation Variabel dengan Performa Kolaborasi.....	70
Tabel 5.7 Matrik Peran Stakeholder.....	72
Tabel 5.8 Hasil Identifikasi dan Peran Stakeholders... ..	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gap Analisis	8
Gambar 1.2 Bagan Sistematika Penulisan.....	11
Gambar 2.1 Tangga dalam Partisipasi Masyarakat.....	14
Gambar 2.2 Gambaran Sosial Kapital.....	14
Gambar 2.3 Triangulasi Data dalam Hubungan Partisipasi	15
Gambar 2.4 Periode Pentahelix Dan Program Daya Saing Berkelanjutan	25
Gambar 2.5 Model Daya Saing Berkelanjutan	25
Gambar 2.6 Pemetaan Penelitian Pentahelix Terdahulu	31
Gambar 2.7 State of The Art	32
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	34
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian	35
Gambar 4.2 Sampel Penelitian	36
Gambar 4.3 Kuadran Importance Performance Analysis.....	45
Gambar 5.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Gambar 5.2 Karakteristik Berdasarkan Usia.....	47
Gambar 5.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan.....	47
Gambar 5.4 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan.....	48
Gambar 5.5 Karakteristik Berdasarkan Jarak Tempuh Pekerjaan... ..	48
Gambar 5.6 Karakteristik Berdasarkan Penghasilan	49
Gambar 5.7 Karakteristik Berdasarkan Tabungan.....	49
Gambar 5.8 Frekuensi Indikator Level Daya Saing	52
Gambar 5.9 Korelasi dan Signifikansi pada Indikator Level Daya Saing.....	52
Gambar 5.10 Korelasi Pearson Periode dan Kinerja Aktor terhadap Performa Kolaborasi	56
Gambar 5.11 Performa Kolaborasi terhadap Level Daya Saing, Periode Kolaborasi dan Kinerja Aktor	57
Gambar 5.12 Interaksi dengan Masyarakat	58
Gambar 5.13 Interaksi dengan Pemerintah... ..	58
Gambar 5.14 Interaksi dengan Akademisi	59
Gambar 5.15 Interaksi dengan Media.....	59
Gambar 5.16 Interaksi dengan Swasta.....	60
Gambar 5.17 Analisis Performa Kolaborasi	69
Gambar 6.1 Rekomendasi.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh di wilayah perkotaan masih hampir selalu menjadi isu utama pembangunan. Arus urbanisasi menjadi tinggi akibat terpusatnya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan yang magnet bagi masyarakat pedesaan untuk bekerja di kota, yang pada akhirnya akan tinggal serta menetap bahkan menempati lahan-lahan ilegal (squatters). Tingginya kebutuhan ruang harus diikuti dengan penataan ruang karena ruang yang tidak ditata akan menimbulkan ruang-ruang negatif (Carmona et.al., 2008) yang berpotensi mengalami ancaman berubah fungsi ruang (Jacob, 1961) dan menciptakan lingkungan permukiman yang kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh juga sering menjadi polemik karena upaya penanganannya terus dilakukan tetapi kawasan kumuh masih tetap bermunculan yang akan berdampak pada timbulnya ketidak teraturan permukiman masyarakat serta tidak terkendalinya peruntukan lahan yang sebenarnya bukan untuk permukiman sehingga seolah menjadi hak milik namun yang tidak sah, selain itu dampak terjadinya krisis sosial ekonomi dalam masyarakat juga memicu tumbuhnya budaya yang tidak mengindahkan lingkungan (Padawangi, 2019).

Kota Tangerang memiliki karakteristik kota yang mempunyai daya tarik sangat kuat karena berada pada daerah Ibu Kota Jakarta yang relative tidak jauh, sehingga memunculkan arus migrasi penduduk yang berasal dari luar wilayah sangat tinggi yang pada akhirnya menjadikan Kota Tangerang sebagai tempat untuk tinggal, tempat untuk usaha, dan tempat untuk melaksanakan aktivitas lainnya. Dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat di segala bidang, baik industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan, maupun transportasi, menjadikan Kota Tangerang tempat dengan peningkatan area terbangun yang cukup luas. Hal ini menyebabkan naiknya angka kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman yang cukup tinggi (Tangerang Dalam Angka, 2024).

Apalagi sesuai dengan visi misi Kota Tangerang yang saat ini mengarah terhadap perdagangan jasa, sehingga dalam setiap perluasan lahan terbangun tersebut difungsikan sebagai permukiman serta perdagangan dan jasa maka secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan dimana salah satunya berupa terbentuknya beberapa permukiman kumuh (Padawangi, 2019).

Berkaitan dengan penataan Kawasan kumuh yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berupa penataan kawasan Rusunawa Pekanbaru, terdapat beberapa faktor penyebab kekumuhan yaitu karena belum adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman legalitas pembangunan, rendahnya daya beli masyarakat, layanan infrastruktur permukiman yang belum memadai, dan belum optimalnya penerapan peraturan (Resadkk, 2017).

Pemerintah Daerah Kota Tangerang juga telah berupaya untuk memberikan pelayanan dan pengaturan terhadap pemenuhan permukiman yang layak khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 dimana wilayah Kota Tangerang diarahkan pada ruang kota sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan regional yang berwawasan lingkungan dan budaya, sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekjur (Tangerang Dalam Angka, 2024).

Penataan ruang kota menjadi sangat penting karena jika tidak ditata dengan baik, ruang – ruang tersebut dapat berubah fungsi dan akan semakin sulit diatur diantara kepadatan penduduk yang tinggi (Padawangi, 2019). Terkait dengan pemanfaatan ruang khususnya ruang untuk permukiman masyarakat maka penataan dan pengaturan ruang kota diarahkan untuk mengembangkan permukiman dan perumahan yang berwawasan lingkungan, selain itu juga juga menata beberapa permukiman kumuh yang ada di wilayah Kota Tangerang, baik *slum* maupun *squatter* (KOTAKU, 2024).

Di sisi lain pemenuhan kebutuhan akan permukiman layak huni bagi masyarakat tentunya tidak akan bisa sepenuhnya ditangani hanya oleh pemerintah daerah karena adanya keterbatasan anggaran dan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah strategi penanganan dalam penataan permukiman masyarakat perkotaan yang melibatkan banyak pihak dan tidak hanya pemerintah daerah saja. Peran serta masyarakat dan berbagai pihak lainnya harus secara aktif dilibatkan baik disaat penyusunan rencana maupun di dalam implementasi dan pengelolaan sumber dananya (Padawangi, 2019).

Pemerintah Kota Tangerang tidak hanya menjadi *public service* dan *facilitator* pembangunan saja yang hanya menyediakan dan memfasilitasi segala hal terkait dengan permukiman layak huni. Akan tetapi juga harus bisa berfungsi sebagai *collaborator* dalam segala aktivitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar permukiman tersebut.

Penanganan masalah kumuh memang tidak mudah, harus ada kolaborasi yang baik antar aktor. Muhyi, dkk (2017) menegaskan bahwa koordinasi yang tidak baik, komitmen yang tidak dilaksanakan dan ancaman global membuat kolaborasi sulit dimaksimalkan. Menurutnya Integratide Model of Partnership akan memudahkan aktifitas penanganan masalah. Ia menambahkan akademisi dan media sebagai aktor utama selain pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kolaborasi Pentahelix.

Kolaborasi pentahelix tidak hanya bersinergi dalam penanganan masalah namun juga terus bersinergi yang berkelanjutan dalam ketahanan informasi, keamanan, budaya dan psikologis masyarakat yang perlu penanganan tersebut (Yunas, 2021). Hal ini didukung oleh BNPB (2019), Rizkiyah dkk (2019), Jahid (2019), Suherlan dkk (2019) bahwa Pentahelix butuh sinergi antar aktor pada penerapan pemulihan korban bencana.

Kolaborasi pentahelix juga sejalan dengan Padawangi (2019) yang mengkaji beragam urbanisasi di Asia Tenggara, bahwa diperlukan alternatif pembangunan untuk mengubah kehidupan sosial dengan cara mendistribusikan kekuatan pemerintah ke akar masalah yaitu rakyat. Kerjasama antar aktor sangat dibutuhkan dan harus didukung dengan rasa saling percaya.

Sebagai informasi bahwa Kolaborasi yang dilakukan untuk penanganan Kawasan kumuh di Kedaung sampai dengan saat ini belum terintegrasi sesuai dengan yang akan penulis sampaikan dalam penelitiannya ini. Perbaikan fisik oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang yang selama ini berjalan hanya bersifat parsial lebih ke penataan dan perbaikan bedah rumah saja, Penyuluhan Keterampilan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial memang sudah dilaksanakan, termasuk juga oleh aparat kelurahan dan kecamatan, namun tidak cukup hanya melibatkan Akademisi, Media dan Swasta terhadap pelaksanaan program yang berdaya saing dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Program-program memang sudah banyak dilakukan selama ini berkaitan dengan program keterampilan, sosial dan ekonomi. Namun antar kegiatan tidak ada kesinambungan terhadap target apa yang ingin dicapai dari masing-masing kegiatan dimaksud. Padahal, dalam penerapan sebuah program perlu ada nya target atau garis merah yang ingin dicapai, seperti peningkatan daya saing masyarakat. Sehingga sasaran yang akan menerima bantuan dapat terdata setiap golongan yang membutuhkan. Misalnya, berapa banyak pelatihan untuk lelaki dewasa, perempuan dewasa, remaja dan anak-anak. Mereka memiliki kebutuhan keterampilan yang berbeda. Maka jenis program juga harus memiliki

level dan peserta yang ingin dicapai. Agar para peserta atau penerima manfaat dapat memahami apa tujuan akhir dari program yang sedang mereka jalani. Pemahaman ini dapat menjadi motivasi yang kuat atas keseriusan mereka dalam mengembangkan potensi diri kedepannya. Maka pemahaman yang lebih baik memicu peningkatan akses informasi, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab serta peningkatan efektivitas program.

Timbulnya kawasan kumuh baru memberikan pelajaran bagi Pemerintah Kota Tangerang bahwa perbaikan kondisi tidak cukup untuk mengurangi luasan kawasan kumuh. Walaupun dengan adanya Pembangunan Rumah Susun saat ini sudah mencapai pengurangan 28,5 Ha Kawasan Kumuh, masih ada 76,71 Ha lagi untuk dikurangi sehingga target 2029 menjadi 0 Ha. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Tangerang, bahwa ada gap/kekosongan aksi yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai target tersebut dan bahkan Pemerintah Pusat Kementerian PUPR melalui BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Banten Direktorat Perumahan pada akhir Maret 2024 sudah mengambil peran untuk melakukan konsolidasi guna menyelesaikan sisa kawasan kumuh di wilayah Kota Tangerang dengan melakukan pembagian tugas dan kewenangan dalam penurunan sisa kawasan kumuh dimaksud. Hal ini tertuang dalam berita acara kesepakatan dan komitmen bersama, Dimana Pemerintah Pusat menurunkan kawasan seluas 19,72 Ha (Cibodas, Batuceper dan Neglasari), Pemerintah Provinsi Banten seluas 16,68 ha (Cipondoh) dan Kota Tangerang seluas 40,12 Ha (Tangerang, Karawaci, Priuk, Ciledug, Laranga, Karang Tengah, Jatiuwung, benda). Dengan demikian harap terkait capaian 0 % yang di proyeksi tahun 2029 ini akan menjadi program untuk Visi Misi 5 tahun selanjutnya melalui RPJMD 2025 – 2029 Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat melalui (BPPW-Banten, 2024)

Selain intervensi fisik yang selama ini sudah dilakukan, nampaknya perlu adanya penggabungan antara program daya saing yang berkelanjutan untuk membentuk perubahan terhadap masyarakat dimaksud. Karena pola pikir terhadap masyarakat akan menjadi dasar terkait bagaimana mereka dapat bertahan menjadi lebih baik setelah adanya intervensi infrastruktur. Daya saing masyarakat diukur melalui 4 variabel yaitu social capital, natural capital, intellectual capital dan governance efficiency (Flores et.al.,2024). Variabel daya saing masyarakat tersebut menjadi fokus dalam peningkatan sumber daya manusia atau masyarakat Kedaung agar dapat berkembang dan mengubah pola pikir masyarakat yang ada saat ini masih konvensional guna mewujudkan sebuah perubahan agar memiliki daya saing yang berkelanjutan.

Program Kolaborasi tidak cukup dilakukan dalam jangka pendek (Muhyi, 2017). Kolaborasi perlu dilakukan dalam jangka waktu yang berkelanjutan, baik mulai dari penanganan masalah, pengembangan potensi dan pencegahan resiko (Resa, 2017). Dengan berlangsungnya kolaborasi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan semakin matang dalam mengubah pola pikir masyarakat. Program tersebut juga perlu dilakukan oleh adanya optimalisasi kinerja aktor yang terlibat. Dalam hal ini, kinerja aktor dapat diukur melalui beberapa variabel yaitu, komitmen, tanggung jawab, ketergantungan partisipasi dan lainnya (Gray, 1989) dan (Rahu, 2021).

Disamping beberapa hasil yang telah dilakukan terkait kolaborasi oleh para peneliti diatas, ada juga yang melakukan sebuah Collaborative Governance yang sebelumnya dipakai dalam penilaian kinerja karyawan di dunia perbankan, terutama dari sisi pelayanan Frontliner antara lain hal penting yang perlu diperhatikan mengenai Collaborative Governance adalah

1. Collaborative Governance terkadang menggambarkan kolaborasi berkembang secara bertahap. Proses yang meliputi persiapan, pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan, dengan setiap langkah memiliki beberapa tahapan. Model kolaborasi panggung penting untuk menarik perhatian pada perubahan strategi kolaborasi seiring perubahan konteks (Munizu, Yusuf, Payangan, & Riodini, 2022)
2. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk : Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya (Munizu, Yusuf, Payangan, & Riodini, 2022).

Variabel-variabel diatas menjadi poin yang akan diukur dalam kapasitas kolaborasi dan saat ini akan diterapkan di Kedaung dalam penanganan Kawasan kumuh. Setelah itu, variabel dimaksud akan dipetakan untuk mencari variabel mana yang harus diprioritaskan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar kebijakan yang akan disarankan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan Kumuh yang ada di Kota Tangerang dikelola dengan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui KOTAKU. Dalam setiap 5 tahun KOTAKU memperbaharui data kawasan kumuh berdasarkan luasan kawasan kumuh yang ditangani oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang. Pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan kawasan kumuh seluas 9,14 hektar, akan tetapi akhir tahun 2021 KOTAKU kembali melakukan verifikasi ulang kawasan kumuh di Kota Tangerang, namun demikian ternyata luasan kawasan kumuh justru bertambah menjadi 105,31 hektar. Hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk mengetahui penyebab mengapa luasan kawasan kumuh justru bertambah.

Penataan kawasan kumuh diperlukan agar tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga dengan bertambahnya luasan kumuh di Kota Tangerang, sebagaimana di wilayah Kedaung Baru yang merupakan *squatter* dimana secara berangsur kondisi tersebut menjadi kawasan kumuh baru yang terbangun dengan sendirinya di lahan milik Pemerintah Kota Tangerang. Sehubungan dengan tersebut, penelitian ini dilakukan di kawasan permukiman kumuh Kota Tangerang yang berlokasi lokasi di wilayah Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Kelurahan Kedaung Baru memiliki luas wilayah sebesar 2,87 km² dengan pembagian jumlah RW sebanyak 3 buah. Melalui survey lokasi, dapat terlihat permasalahan yang ada pada lokasi mencakup banjir, tata air yang tidak baik dan bau, keamanan ruang gerak yang langsung di tepi jalan, ketidak sesuaian fungsi ruang serta keluhan - keluhan lainnya yang diutarakan oleh warga saat diskusi menampung permasalahan yang ada. Banjir, ketidak sesuaian fungsi ruang, pencemaran udara dan tata air menjadi masalah bagi Kesehatan dan lingkungan secara menyeluruh.

Jika faktor-faktor masalah ini terus dibiarkan, maka masyarakat sulit dapat menjadi lebih sejahtera kedepannya. Karena waktu, tenaga dan pendapatan mereka terpakai untuk mengatasi masalah yang selalu datang, bukan untuk memperbaiki perekonomian mereka. Ditambah lagi saat terjadinya pandemi Covid-19 yang mewabah di dunia secara menahun, maaka tidak heran jika luasan kawasan kumuh semakin bertambah karena level ekonomi masyarakat turun diakibatkan banyak efek domino yang terjadi tersebut.

Penerapan model yang akan diterapkan terhadap penanganan kawasan kumuh di Kota Tangerang melalui model Pentahelix, dimana model tersebut akan melibatkan Pemerintah, Dunia usaha, Masyarakat, Akademisi,

serta Media. Namun demikian saat ini penerapan model pentahelix hanya terjadi terhadap penanganan kawasan kumuh hanya dengan membangun sarana dan prasarana permukiman, kesehatan dan pendidikan belum merambah terhadap usaha bagaimana masyarakat tersebut memperbaiki keadaan ekonominya. Susanti dkk (2024) menambahkan bahwa perlu adanya kebijakan terpadu yang mendukung tiga dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Oleh karena itu, kajian ini mengangkat keberlanjutan daya saing (Flores, 2020) ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mengurangi luasan kawasan kumuh baru kedepannya.

Selain masalah kekumuhan, adapun potensi, ancaman dan kesempatan yang perlu dikaji kembali di Kedaung Baru dan Kedaung Wetan adalah keragaman budaya yang terdiri dari Pecinan dan Suku Betawi yang menjadi potensi dan dapat dikembangkan untuk mengangkat daya saing masyarakat disekitarnya. Misalnya dengan kuliner khas dan perbedaan budaya ini merupakan kesempatan bagi Kedaung Wetan dan Kedaung Baru untuk menciptakan UMKM yang lebih baik dan berdaya saing. Daya saing masyarakat ini perlu digali agar masyarakat setempat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan yang dapat menjadi peluang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang analisa potensi, kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT) seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui terdapat masalah utama yaitu dalam pemenuhan kebutuhan akan permukiman layak huni bagi masyarakat di Kota Tangerang, sehingga diperlukan strategi penanganan dalam penataan permukiman masyarakat perkotaan yang melibatkan banyak pihak dan tidak hanya pemerintah daerah saja. Model partisipasi-kolaboratif yang dikaitkan dengan peningkatan daya saing menjadi pilihan yang sangat layak untuk dicoba dalam penataan dan pengaturan permukiman masyarakat perkotaan, sehingga diharapkan mampu mengatasi kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kekumuhan di wilayah perkotaan.

Berdasarkan latar belakang di maksud, maka nampaknya diperlukan sebuah kajian tentang model pembangunan partisipasi-kolaboratif seperti apa ? dan bisa digunakan sebagai bentuk pendekatan perencanaan dalam kaitannya dengan penataan kawasan kumuh perkotaan. Selain itu, pendekatan seperti apa ? yang diharapkan mampu menjadikan kawasan kumuh tersebut berubah menjadi kawasan yang tidak saja tertata lingkungannya, akan tetapi secara ekonomi mampu mendatangkan 'keuntungan' dan dampak 'positif' bagi kehidupan masyarakat serta dapat meningkatkan Daya saing daerah sebagai bagian dari peningkatan ekonomi daerah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan program daya

saing, periode dan aktor kolaborasi diharapkan dapat memberikan pandangan baru dalam model kolaborasi pentahelix, maka penelitian ini merumuskan masalah yang dipandang sangat urgensi adalah **“PENTINGNYA IMPLEMENTASI KOLABORASI YANG SISTEMATIS”**

Gambar 1.1 Gap Analisis

Sumber : Analisis Penulis (2024)



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar adalah bertujuan mempelajari bagaimana upaya penataan tersebut mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi sesuatu yang berpengaruh pada peningkatan daya saing daerah.

Tujuan terbagi menjadi 2 yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya adalah merumuskan bentuk strategi daya saing berkelanjutan dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif-kolaboratif dalam upaya penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang.

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Menganalisis program kolaborasi yang sudah berjalan saat ini
2. Menganalisis periode kolaborasi yang sudah berjalan saat ini
3. Menganalisis kinerja aktor kolaborasi yang sudah berjalan saat ini.
4. Menganalisis hubungan program, periode dan kinerja aktor terhadap kolaborasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara umum, penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan bagi berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Tangerang, mulai dari unsur pemerintah, pelaku bisnis, komunitas/masyarakat, akademisi,

penggiat media, para investor, hingga mitra pengelola kawasan, terkait dengan gambaran dan pendekatan model perencanaan dengan paradigma baru, yakni model partisipasi dan kolaborasi pemerintahan untuk meningkatkan daya saing daerah. Secara khusus (bagi dunia dan akademisi), penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemantik munculnya pemikiran akademis ataupun penelitian lebih lanjut terkait dengan teori partisipasi-kolaborasi masyarakat di era *'post-modern'*, yang dirasa saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat akibat pesatnya perkembangan teknologi revolusi industri 4.0.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini didasari atas keinginan peneliti untuk mencari bentuk pendekatan yang ideal agar bisa digunakan sebagai bagian dari strategi pembangunan dalam penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang, sehingga menjadi kawasan yang tidak saja layak untuk dihuni oleh masyarakat, tetapi juga menjadi kawasan yang potensial bagi pengembangan ekonomi daerah, terutama jika kaitannya dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi terhadap daerah-daerah lainnya.

Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan permukiman kumuh di kota-kota lain, baik yang secara regional berdekatan dengan Kota Tangerang maupun yang secara kondisi mempunyai karakteristik yang menyerupai Kota Tangerang.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan daya saing suatu daerah terhadap daerah lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan sebagai alur logika peneliti dari apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penelitian. Sejak dari analisis sampai output yang dihasilkan oleh penelitian tersebut. Gambaran umum sistematika penulisan ini meliputi:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik teoritis ataupun praktis dan sistematika penulisan. Dalam bab ini terdapat alasan bahwa penelitian dilakukan terutama karena sulitnya mengurangi kawasan kumuh, sehingga model pentahelix yang selama ini dilaksanakan perlu diperbaharui guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Bab II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan teori - teori yang pernah dinyatakan dalam penelitian sebelumnya dan melihat hubungannya dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Hal ini untuk melihat posisi penelitian ini dapat berkontribusi dalam pembaharuan model pentahelix yang ada.

Bab III Kerangka Pemikiran

Menjelaskan alur pikir dan tahapan dalam penelitian. Bagan kerangka pemikiran memberikan gambaran penelitian yang akan dituju. *State of the Art* juga digambarkan dalam bentuk diagram.

Bab IV Metode Penelitian

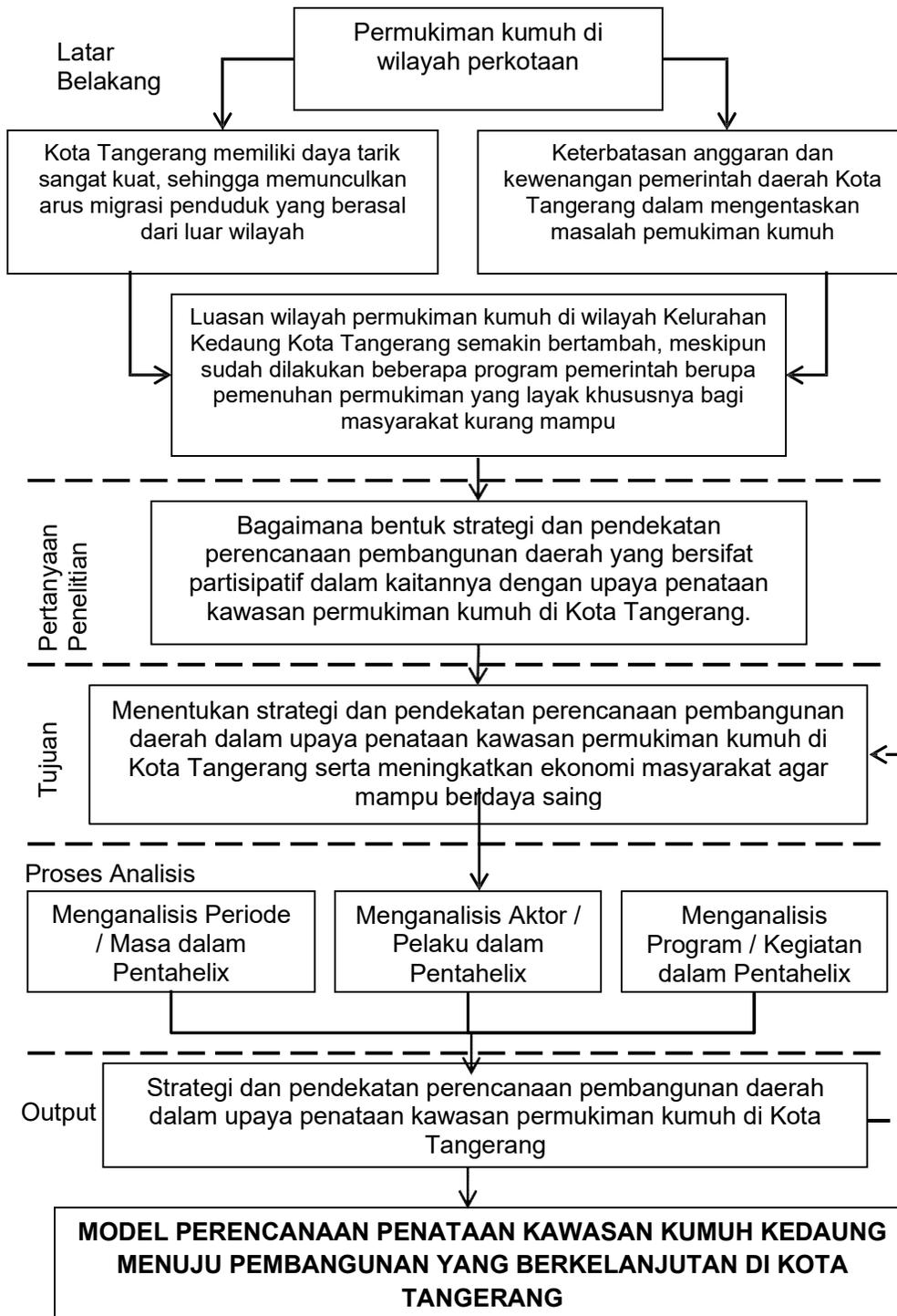
Menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan analisa data tersebut. Bab ini merupakan persiapan dalam mendapatkan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.

Bab V Hasil dan Pembahasan Penelitian

Menjelaskan dan menganalisi hasil penelitian dengan berbagai instrumen yang telah dilakukan mengenai kondisi karakteristik masyarakat, serta aktor, program dan periode yang digunakan dalam partisipasi model pentahelix sebagai upaya dalam mengatasi kawasan kumuh dan mengembangkan masyarakat menjadi berdaya saing.

Bab VI Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan hasil temuan penelitian di lokasi yang telah dianalisis lebih lanjut. Rekomendasi juga disampaikan pada akhir kajian ini kepada semua stakeholder pentahelix guna memaksimalkan potensi pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.



Gambar 1.5 Bagan Sistematika Penulisan
Sumber : Hasil Analisis Penulis (2024)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Permukiman Kumuh Perkotaan

Permukiman, menurut (Mulyono, 2009) adalah kelompok rumah hunian pada suatu kawasan beserta kelengkapan prasarana yang ada di dalamnya. Permukiman dapat berbentuk kelompok rumah, kampung, atau wilayah permukiman yang sangat luas. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 bahwa pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman kumuh sering didentifikasi sebagai Kawasan yang memiliki kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya. Adisasmita (2010) menyatakan bahwa "Kumuh atau Slum, adalah permukiman atau perumahan penduduk kota yang miskin dan padat yang digambarkan dengan lorong-lorong serta tidak higienis.

Adapun tujuh indikator kawasan permukiman kumuh menurut standar KOTAKU yaitu Drainase lingkungan, Air bersih, Tata bangunan, Air limbah, Persampahan, Pemadam kebakaran, Jalan lingkungan.

2.1.2 Penataan Wilayah Kumuh Perkotaan

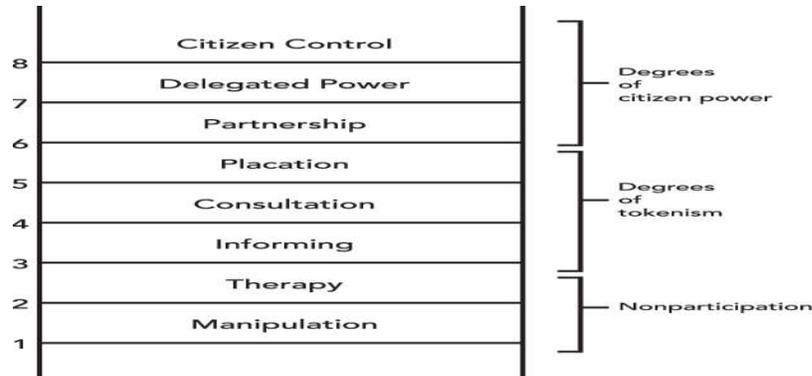
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hunian lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan. Perkembangan Kawasan permukiman dapat juga disebut sebagai proses pembangunan lahan yang ada secara terus menerus (Yunus, 2010). Perkembangan permukiman merupakan fenomena pola ruang yang nyata terlihat, dan dapat diamati secara langsung maupun tidaklangsung di permukaan bumi. Dalam hal ini perkembangan permukiman sangat berkaitan dengan 'proses spasialisasi kawasan perkotaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 juga menyampaikan bahwa beberapa aspek yang harus diperhatikan/dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan/pemukiman, yaitu: a).Pembinaan; b).Tugas dan kewenangan; c).Penyelenggaraan perumahan; d).Penyelenggaraan kawasan permukiman; e).Pemeliharaan dan perbaikan; f).Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh; g).Penyediaan tanah; h).Pendanaan dan pembiayaan; i).Hak dan kewajiban; serta j).Peran/partisipasi masyarakat.

Salah satu cara dalam mengatasi kawasan kumuh dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk melakukan partisipasi baik pada tahap perencanaan ataupun pelaksanaan di setiap kegiatan tersebut (Maulana & Sunarti, 2021) namun keterlibatan aktor lain seperti akademisi, media, swasta, dan masyarakat itu sendiri menjadi penentu dalam konsep mengatasi masalah peningkatan kualitas permukiman (Noureddine Tag-Eldeen, 2003)

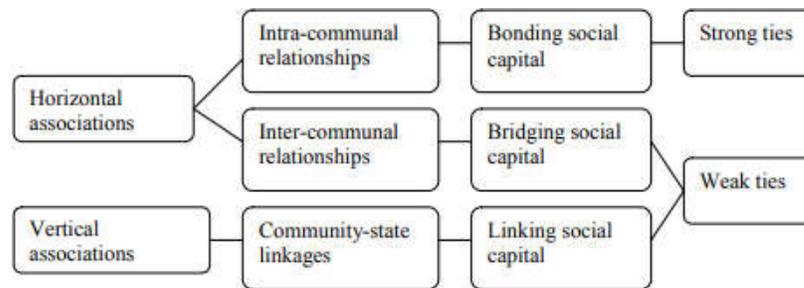
Perkembangan penduduk dengan minimnya intervensi pemerintah, akan menjadi vernacular, dimana perkotaan akan berkembang secara alami. Perkembangan secara alami dapat berupa mengikuti alam (sungai, laut dll) dan dapat juga mengikuti pusat ekonomi seperti pasar. Perkembangan Vernacular akan memakan waktu yang cukup lama. Menurut Aziz & Shawket (2011), perkembangan vernacular arsitektur akan lebih berkelanjutan, karena berkembang sesuai dengan kondisi ekologi dan budaya setempat.

Namun demikian, perkembangan yang tidak terarah akan beresiko menciptakan adanya ruang-ruang negative yang dapat menimbulkan ancaman bagi perkembangan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, penataan oleh pemerintah sangat diperlukan. Arnstein (1969) mengatakan bahwa masyarakat harus bekerjasama dengan pemerintah dan secara teori tangga bahwa masyarakat juga menjelaskan perlunya pemerintah sebagai fasilitator.



Gambar 2.1 Teori Tangga dalam Partisipasi Masyarakat
 Sumber : Arnstein (1969)

Hal senada diungkapkan Woolcock (2001) dan Archer (2010) bahwa untuk mengubah permukiman kumuh harus difasilitasi oleh pemerintah dengan metode Social Capital, dimana pemerintah harus mengarahkan (Bonding), menjembatani (Bridging) dan menghubungkan (Linking). Sebagaimana yang tergambar pada gambar bahwa aktor utama dalam model ini adalah pemerintah dan masyarakat.

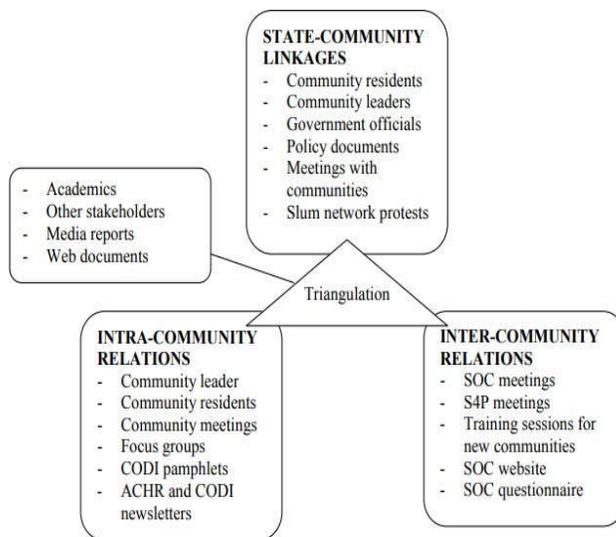


Gambar 2.2 Gambaran Sosial Kapital
 Sumber : Woolcock (2001) dalam Eldeen (2003)

Social capital ini pun dibantah oleh Putnam (1993), karena social capital dapat menciptakan kelompok negatif dalam mengakomodir kepentingan pemerintah atau golongan tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menghilangkan kawasan kumuh. Sehingga Putnam mengabaikan pemerintah dalam pembangunan yang baik. Kemudian DeFilippis (2001) mengkritisi pernyataan Putnam dalam mengabaikan pemerintah dalam pembangunan, menurutnya sosial dan kapital tidak dapat dipisahkan, dan kaitannya dengan komunitas pembangunan ekonomi.

Selain masyarakat dan pemerintah, keterlibatan mitra usaha (swasta) juga diperlukan. Dengan teori Participatory Urban Triad, Kotus dan Sowada (2017) mengatakan bahwa keterlibatan mitra usaha penting dalam prose kolaboratif manajemen perkotaan. Perilaku masyarakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Masyarakat adalah aktor utama dalam upaya menghilangkan kawasan kumuh. Jika penghilangan kawasan kumuh dengan cara intervensi pemerintah atau secara searah (up-bottom), maka masyarakat kumuh tersebut akan mencari ruang lainnya yang belum tertata dan akan menciptakan ruang negatif baru yang berkembang menjadi kawasan permukiman kumuh baru.

Eldeen (2003) mengungkapkan teori *Community Participation* dengan enam pilar, yaitu Usaha mandiri, Perkembangan lingkungan, Keterlibatan Komunitas, Kedekatan Pembuat kebijakan, Pemerintah dan Swasta menjadi penentu dalam konsep tersebut. Model ini sudah lebih banyak aktor yang terlibat. Namun, model ini terbatas karena hanya melibatkan 30 orang masyarakat yang menghuni proyek percontohan kolaborasi pemerintah dengan swasta.



Gambar 2.3 Triangulasi Data dalam Hubungan Partisipasi
Sumber : Thesis of Nouredine Tag-Eldeen (2003)

2.1.3 Partisipasi dan Kolaborasi

Partisipasi merupakan tindakan saling berbagi dalam memformulasikan kebijakan dan usulan kegiatan (Skeffington, 1969). Menurut United Nations Development Program (UNDP, 1997), partisipasi digambarkan dalam dua hal, yaitu partisipasi sebagai “alat” (*participation as a mean*) dan partisipasi sebagai “akhir” (*participation as an end*). Pengertian partisipasi sebagai alat ini dipandang sebagai “proses” dimana masyarakat bekerjasama (gotong-royong) dalam suatu kegiatan, sedangkan pengertian kedua, partisipasi dipandang sebagai “tujuan” yang dinyatakan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk meningkatkan tanggungjawab terhadap pembangunan. Ada tiga prinsip dalam partisipasi masyarakat, yaitu: sukarela, keterlibatan emosional, dan manfaat (Wasistiono, 2003).

Setidaknya ada tiga alasan menggalakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan (Diana, 1984). **Pertama**, mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga pelibatannya dapat membantu penyusunan perencanaan melalui informasi dan identifikasi preferensinya. **Kedua**, masyarakat akan suka dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dari awal (preparasi). **Ketiga**, adanya kesadaran bahwa untuk menjalankan demokrasi yang benar harus melibatkan masyarakat didalam pembangunan.

Tipologi partisipasi masyarakat terbagi menjadi 8 tingkatan (Arnstein, 1969), yaitu (1) *Manipulation*; (2) *Therapy*; (3) *Informing*; (4) *Consultation*; (5) *Placation*; (6) *Partnership*; (7) *Delegated power*; dan (8) *Citizen control*. Dalam perjalanannya konsep ini mengalami perkembangan menjadi kolaborasi dengan cara penyelesaian suatu masalah yang melintasi batas, melintasi sektor, melintasi hubungan (O’Leary, 2010). Kolaborasi, dijelaskan lebih detail lagi sebagai “kerjasama yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan oleh kedua pihak atau lebih secara bersamaan”, yang membutuhkan pola/bentuk keterkaitan antar individu/organisasi dalam berbagi, berpartisipasi, dan menyetujui/bersepakat melakukan aksi atau program bersama dengan cara berbagi informasi, sumber daya, manfaat, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. (Roschelle & Teasley, 1995) mengatakan bahwa: “*collaboration more specifically as mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together*”. Selanjutnya, Roschelle dan Teasley menjelaskan pula

bahwa : “*collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence*. Maksud dari pernyataan ini adalah kolaborasi akan memunculkan program kebersamaan dalam berbagai pemecahan masalah, penanganan risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan komitmen. Konsep kolaborasi akan diterapkan terhadap terciptanya sikap saling percaya antar aktor dalam segala keadaan, waktu, dan kesempatan.

Sebagaimana dijelaskan pula oleh Wanna dan Shergold (2008) bahwa kolaborasi bertransformasi dari *Command, Coordinaton, Cooperation* hingga menjadi *Collaboration*. Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungannya. Menurutnya kolaborasi adalah kerjasama antara beberapa aktor / lembaga otonom yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga bentuk ketergantungannya tidak terlalu terikat secara administratif, namun peran masing - masing aktor sangat penting.

Secara lebih lengkap, menurut (Sanaghan & Lohndorf, 2015), konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi adalah: “*Collaboration involves a transparent and trusted communication process where all parties feel informed and can provide feedback and ideas to others with whom they work. Most importantly, collaboration involves shared decision making, where the decision rules are understood by everyone and all involved parties can inform or influence important decisions that can potentially impact them, especially resource allocation decisions*”. Di sini kolaborasi dianggap memiliki unsur lebih lengkap, yaitu unsur ‘*decision rules*’ dan ‘*decision making*’, terhadap keputusan yang dipilih atas penanganan kasus yang dibutuhkan dalam proses kolaborasi. Dengan demikian, kolaborasi memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar ‘kerja sama intensif’ agar saling mengerti perlunya kerja sama sebagai sebuah strategi menghadapi dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan bersama.

2.1.4 Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance)

Model dengan melibatkan banyak aktor diyakini sebagai akar dari pendekatan *collaborative governance* (Hanberger, 2004). Model *collaborative governance* ini sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah yang semakin memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga dibutuhkan berbagai aktor (multi-aktor) untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut. Artinya, *collaborative governance* dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan program melalui keterlibatan lintas aktor dalam hal pengaturan aksi kolaborasi.

Hirschhorn (2021) memiliki pandangan yang serupa. Dalam *collaborative governance* perlu adanya struktur respon yang baik. Dengan Multi Level Governance Response seperti yang diterapkan dalam penanganan Covid 19 akan memberikan hasil yang cepat tanggap.

Collaborative governance mengumpulkan para aktor baik pemerintah dan swasta dalam sebuah forum untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan. (Chris & Gash, 2008) mendefinisikan *collaborative governance* merupakan tindakan membuat pedoman aksi yang mengatur dua lembaga atau lebih dalam urusan publik baik langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan kolaborasi, masing-masing pihak harus memiliki keterikatan secara resmi serta komitmen kuat terhadap hal yang disepakati. Tugas-tugas dipercayakan secara penuh kepada seluruh aktor dengan tetap melaksanakan koordinasi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan bersama.

Dari definisi di atas, (Emerson & Nabatchi, 2015) menjabarkan enam kriteria *Collaborative Governance*, yaitu : 1).Terdapat lembaga publik, private, dan masyarakat; 2).Aktor non-state ikut berpartisipasi; 3).Peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya ‘berkonsultasi’; 4).Forum secara resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif; 5).Forum bertujuan membuat keputusan dengan konsensus; dan 6).Fokus kerjasama adalah kebijakan/manajemen publik.

2.1.5 Pembangunan Berkelanjutan

Pada bulan september 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki 17 tujuan dan 169 target dengan indikator kongkritnya adalah mengatasi kemiskinan, perubahan iklim dan kesenjangan baik di negara maju maupun berkembang. Agenda pembangunan global ini didasarkan pada pandangan holistik tentang keberlanjutan dan pentingnya dimensi lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Meningkatnya pengakuan terhadap peran pemukiman sebagai komponen kunci dari tantangan dan solusi global mengikuti pertumbuhan eksponensial populasi perkotaan, dari 30% populasi global pada tahun

1950 menjadi 54% pada tahun 2014, dan diperkirakan akan mencapai 66% pada tahun 2014. pada tahun 2050, yang berarti tiga kali lipat total populasi global pada tahun 1900. Wilayah perkotaan di dunia, yang menempati 3% - 4% permukaan tanah dunia, menggunakan 80% sumber daya yang ada, dan mengeluarkan sebagian besar limbah padat, cair, dan limbah bumi. limbah berbentuk gas. Pada saat yang sama, mereka menjadi semakin rentan terhadap risiko perubahan iklim dan, selanjutnya, menghadapi tantangan kesehatan yang serius, yang pada gilirannya terkait dengan perluasan layanan kesehatan, infrastruktur, dan biaya - biaya lain yang membebani perekonomian dan lingkungan (Roseland & Spiliotopoulou, 2017)

Proses pengembangan kerangka penilaian keberlanjutan harus dipimpin oleh serangkaian prinsip panduan seperti kecukupan dan peluang penghidupan, kesetaraan antar generasi dan antar generasi, tindakan pencegahan dan adaptasi, serta pemeliharaan dan efisiensi sumber daya. Meskipun karakter kontekstual komunitas sosial mungkin menimbulkan kesulitan dalam pelingkupan dan implementasi karena pertanyaan mengenai batasan, keterbandingan, dan aksesibilitas data (Joss, et al., 2015), kerangka kerja yang terstandarisasi dan *out of the box* mungkin terlalu berbasis data dan tidak selalu relevan dengan tempat, karena nilai - nilai dan budaya komunitas dapat memisahkan data dari kenyataan. Para peneliti cenderung setuju bahwa indikator yang efektif haruslah : relevan dan bermakna, terukur dan layak, memadai, skala tepat waktu dan konsisten, partisipatif, sistemik, dan fleksibel (SDSN, 2014)

Banyak alat perencanaan dan penilaian tersedia untuk membantu warga negara dan pemerintah mengelola keberlanjutan masyarakat. Alat perencanaan dan penilaian masyarakat dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang hanya memiliki sedikit pelatihan, sedangkan alat perencanaan dan penilaian teknis sering kali memerlukan keterlibatan staf atau konsultan yang terlatih (Roseland & Spiliotopoulou, 2017).

Kedua jenis alat tersebut dapat digunakan dalam proses partisipasi masyarakat, meskipun alat perencanaan dan penilaian teknis mungkin memerlukan adaptasi dan interpretasi untuk konsumsi masyarakat. Dalam kedua situasi tersebut, penting bagi masyarakat untuk memahami jenis alat keberlanjutan apa yang digunakan oleh pemerintah kota mereka. Agar dapat digunakan secara efektif, alat yang tepat harus disesuaikan dengan konteks situasi perencanaan, yang mungkin

mengharuskan praktisi dan pemangku kepentingan untuk menggunakan alat yang berbeda pada tahapan proses perencanaan yang berbeda. Penting juga untuk dipahami bahwa perangkat komunitas dan teknis dapat saling melengkapi dan digunakan secara parallel

Membangun dan memelihara relasi atau hubungan dengan orang lain menjadikan sarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan mereka dalam merencanakan keberlanjutan. Keberlanjutan adalah sebuah proses yang terus berkembang yang memerlukan perencanaan dan penetapan tujuan jangka panjang, serta pembelajaran: karena staf pemerintah pasti akan berubah sebelum banyak tujuan jangka panjang dapat dicapai, maka pembangunan berkelanjutan harus dipahami secara mendalam di seluruh daerah termasuk juga untuk otoritas serta diperlukannya kerjasama lintas departemen (Polk, 2011). Oleh karena itu, keberhasilan perencanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan kapasitas kelembagaan yang kuat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun otoritas.

2.1.6 Konsep Aktor dalam Pentahelix

Aktor merupakan penggerak dalam perjalanan pentahelix, diperlukan keputusan bersama oleh semua aktor (Joint Ownership Decisions) dalam bentuk tanggung jawab bersama, komunikasi, nilai tambah dan deliberasi (Rahu, 2021). Lemahnya koordinasi, kepedulian dan bantuan dari antar aktor dapat membuat penanganan akan sulit diselesaikan (Indarto dan Ratnawati, 2021).

Pentahelix dalam pengembangan kawasan wisata dilaksanakan pembagian tugas dengan model kooperatif. Dimana pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, komunitas masyarakat sebagai manajer, akademisi sebagai pendamping, swasta sebagai partner kerja, media sebagai promotor (Pusparani dan Rianto, 2021).

A. Masyarakat

Peran masyarakat sebagai salah satu aktor dimulai sejak masa perencanaan hingga penerapan pembangunan di daerah. Konsep Community Based Tourism (CBT) dalam hal ini contohnya menjabarkan bahwa peranan masyarakat dalam pariwisata, ditempatkan sebagai aktor utama melalui kegiatan pemberdayaan, sehingga manfaat program atau aksi bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat Kedaung Baru dan Kedaung Wetan yang beragam menjadi potensi bagi pariwisata. Terutama adanya kampung Pecinan dan kampung Betawi menambah ciri khas yang bernilai dalam kearifan lokal. Hal ini yang tidak dapat dipisahkan terhadap masyarakat lokal yang memiliki kebudayaan tersebut dapat menjadi potensi baru sebagai sumber kehidupan ekonomi dalam pengembangan kehidupan lainnya, sehingga semakin memperlihatkan kepariwisataan di Kedaung Baru dan Kedaung Wetan walaupun mata pencaharian rutinitas yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat kedaung tersebut sebagai pemilah sampah plastik.

Kearifan lokal merupakan suatu keunggulan budaya masyarakat yang diartikan sebagai ciri khas sesuai dengan kondisi geografis juga sebagai produk budaya masa lalu. Nilai - nilai yang telah berjalan dalam kehidupan budaya dan masyarakat, memperlihatkan model perilaku yang mungkin akan pudar atau bahkan hilang dalam proses kehidupan masyarakat setempat akibat pengaruh dari teknologi dan perkembangan jaman. Agar nilai budaya dan semua yang terkandung dalam bentuk kearifan lokal atau lainnya dapat kita lestarikan, maka semua aktor baik pemerintah, masyarakat, swasta senantiasa berupaya menjaga nilai budaya tersebut (Maturbongs, Suwitri, Kismartini, & Purnaweni, 2019).

Kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pendatang dalam pengembangan bidang pariwisata yang berkelanjutan merupakan suatu upaya yang memaksimalkan pelibatan masyarakat adat setempat. Kelompok yang dibentuk seperti dewan kesenian daerah, LSM, atau kelompok-kelompok berdasarkan minat atau hobi, yang bertujuan mengeksplor atau mempromosikan kepariwisataan di daerah. Kelompok itu memiliki peran dalam memberikan masukan kepada aktor yang dapat berperan sebagai penggerak sektor-sektor lainnya. Komunitas seperti influencer, youtuber, komunitas fotografi, pegiat wisata lainnya sebagai media promosi wisata daerah. (Maturbongs dan Lekatompessy, 2020)

B. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki pola birokrasi structural dan administrasi yang tertata dan bertanggung jawab dalam membuat serta mengimplementasikan suatu kebijakan (Elmore, 1980). Kewenangan atas implementasi kebijakan dalam pemerintahan berdasar mandate dari badan legislatif (Yuningsih, Darmi, & Sulandari,

2019). Pemerintah terbagi dua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertugas memberikan kebijakan yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerah di Kabupaten Merauke yaitu Dinas ataupun Lembaga Teknis Daerah memiliki keunggulan dalam pariwisata. Maka penekanan perannya dalam urusan pariwisata, kebudayaan dan kesenian, baik terhadap perencanaan pengembangan, metode dan seluruh infrastruktur yang mendukung kepariwisataan perlu dikelola secara menyeluruh. Birokrasi sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan publik, namun dalam implementasi kebijakan aktor lain yang juga terlibat adalah legislatif. (Maturbongs dan Lekatompessy, 2020).

C. Swasta

Di Kota Tangerang, banyak objek wisata yang dapat menjadi daya Tarik. Dengan potensi wisata tersebut, pihak swasta dapat dilibatkan dalam memberi Banyaknya objek wisata di Merauke, menjadi peluang bagi masyarakat untuk dapat menggerakkan perekonomian daerah dengan menjadi pebisnis/pengusaha. Bisnis dibidang pariwisata cukup ramai, hal tersebut dipengaruhi oleh peran media sosial dalam mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata yang ada. Dengan demikian memberikan peluang bagi masyarakat untuk berbisnis di bidang pariwisata.

Peluang bisnis yang memiliki nilai jual dalam hal ini adalah jasa, baik itu jasa pemandu wisatawan, jasa transportasi, jasa transportasi ataupun jasa akomodasi lokal yang menawarkan pengenalan masyarakat local atau setempat. Sedangkan produk yang medapat memiliki nilai jual barang seperti makanan, pakaian khas, souvenir ataupun hasil karya masyarakat.

D. Akademisi

Di Kota Tangerang terdapat beberapa Universitas, seperti Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Rahardja, Universitas Islam Syekh Yusuf dan lainnya. Adapula sekolah-sekolah SMA, SMK dan setara lainnya. Kampus dan sekolah tersebut memiliki program Kuliah Kerja Lapangan, Praktek Lapangan yang bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan ilmu terapan atau keterampilan siswa didik. Hal ini merupakan kesempatan bagi pihak akademisi untuk terlibat dalam program kolaborasi yang ada di Kedaung. Bahkan universitas dan

sekolah dari luar Kota Tangerang pun dapat terlibat dengan baik. Selain itu Pihak Kampus dan sekolah juga mendapat nilai tambah atau angka kredit jika memiliki Kerjasama dengan masyarakat. Para akademisi dapat berperan sebagai actor yang memiliki kepakaran dibidangnya, serta dapat membantu pendekatan program kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mudah memahami tujuan kolaborasi jangka Panjang. Akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Kapasitas akademisi untuk membentuk masyarakat melalui penyediaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, sehingga pengetahuan ekonomi dapat berkembang. Disamping itu, mempersiapkan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan bakat dan menghasilkan pengetahuan serta keterampilan yang inovatif, giat dan berwirausaha (Halibas dkk, 2017).

Dalam kolaborasi dapat meningkatkan peluang munculnya inovasi-inovasi baru yang melibatkan teknologi terapan. Karena ilmu atau teknologi yang dipelajari pada masa pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi ataupun karakter masyarakat setempat. Keterlibatan perguruan tinggi dapat memberi berkontribusi terhadap kemajuan kepariwisataan, serta sosial ekonomi setempat. (Maturbongs dan Lekatompessy, 2020)

E. Media

Media merupakan sarana informasi yang dapat menyebarkan berita dengan sangat cepat. Media sebagai aktor berpotensi besar bagi menyampaikan informasi tentang kepariwisataan di Kedaung Baru dan Kedaung Wetan. Media dapat berbentuk elektronik, digital dan cetak. Media massa sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kebijakan, serta sebagai link penghubung antara pemerintah dan masyarakat (Howlett & Ramesh, 1995).

Saat ini media sosial seperti facebook, youtube, tiktok, Instagram dan lainnya sangat dikenal oleh masyarakat. Media elektronik pun sudah ditinggalkan oleh anak-anak muda saat ini. Jika ada informasi yang dikemas mengenai Kedaung Baru dan Kedaung Wetan, maka informasi tersebut dapat tersebar dengan cepat melalui beragam media. Pelaku media tidak hanya wartawan, masyarakat umum pun dapat mengemas berita atau informasi yang unik agar dapat disebarluaskan.

Dengan adanya otonomi daerah, dimana pendapatan daerah menjadi prioritas dan capaian kinerja bagi pemerintah setempat yang akan berpengaruh kepada bantuan sosial, serta program-program kemasyarakatan. Dalam hal ini hasil dari pendapatan tersebut akan Kembali dinikmati oleh masyarakat setempat. Maka sudah sepatutnya seluruh pihak berkolaborasi mengemas kepariwisataan ini menjadi daya tarik yang memiliki nilai jual. Daerah terus mempromosikan objek wisata yang dapat menarik minat para penikmat wisata itu sendiri, baik itu wisata alam, wisata budaya, wisata rohani dan jenis wisata lainnya. Promosipun dapat melalui kepuasan pengunjung yang datang. Pengunjung yang puas dapat merekomendasikan daerah tujuan wisata untuk dikunjungi. (Maturbongs dan Lekatompessy, 2020).

2.1.7 Konsep Program dalam Pentahelix

Program menurut kamus Origin adalah *a proclamation* atau sesuatu yang sudah dideklarasikan/dinyatakan. Dalam kajian ini dimaksudkan bahwa program merupakan kegiatan yang sudah dinyatakan untuk dilakukan fokus kepada membuat masyarakat mandiri.



Gambar 2.4 Periode Pentahelix Dan Program Daya Saing Berkelanjutan
Sumber : Analisis Penulis (2024)

Hal ini sejalan dengan model daya saing berkelanjutan oleh Flores et.al. (2020) pada Gambar 3.2 yang meliputi, penguasaan sumber daya alam, penguasaan sosial, penguasaan keilmuan dan pengaturan penghematan.



Gambar 2.5 Model Daya Saing Berkelanjutan

Sumber : Flores et.al. (2020)

Natural Capital

adalah penguasaan terhadap alam yang mempengaruhi manusia, beberapa narasumber mendefinisikan mengatakan sebagai berikut :

Natural capital is the world's stock of *natural resources*, which includes geology, soils, air, water and all living organisms. Some natural capital assets provide people with free goods and services, often called *ecosystem services*. All of these underpin our economy and society, and thus make human life possible.

1. "What is natural capital?". *naturalcapitalforum.com*. World Forum on Natural Capital. Archived from the original on 6 October 2019. Retrieved 31 December 2015.
2. ^ "What is Natural Capital". *www.naturalcapitalcoalition.org*. Natural Capital Coalition. Archived from the original on 2 June 2016. Retrieved 31 December 2015.

Intellectual Capital

adalah penguasaan terhadap pengetahuan yang mempengaruhi manusia, beberapa narasumber mendefinisikan sebagai berikut :

- Menurut Arfan Ikhsan (2008:83), Intellectual Capital adalah nilai total dari suatu perusahaan yang menggambarkan aktiva tidak berwujud (intangibile asstes) perusahaan yang bersumber dari tiga pilar, yaitu modal manusia, struktural dan pelanggan.

- Menurut Pangestika (2010), Intellectual Capital mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Modal intelektual telah diidentifikasi sebagai seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan, dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai.
- Menurut Stewart, Intellectual Capital (modal intelektual) adalah materi intelektual pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Ulum, 2013:189).
- Menurut Gunawan dkk (2013), Intellectual Capital merupakan aset tidak berwujud, termasuk informasi dan pengetahuan yang dimiliki badan usaha yang harus dikelola dengan baik untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi badan usaha.
- Menurut Puspitasari (2011), Intellectual Capital adalah ilmu pengetahuan atau daya pikir yang dimiliki oleh perusahaan, tidak memiliki bentuk fisik (tidak berwujud), dan dengan adanya modal intelektual tersebut, perusahaan akan mendapatkan tambahan keuntungan atau kemapanan proses usaha serta memberikan perusahaan suatu nilai lebih dibanding dengan kompetitor atau perusahaan lain.

Social Capital

adalah penguasaan terhadap lingkungan sosial yang mempengaruhi manusia, beberapa narasumber mengatakan sebagai berikut:

- Menurut Coleman modal sosial merupakan aspek aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru.
- Menurut Piere bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui.

- Menurut Ananto Widagdo (2021), model sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait koma yang didasarkan pada nilai kepercayaan norma norma dan jaringan sosial.

Governance Efficiency

adalah kemampuan mengatur penghematan yang mempengaruhi manusia

2.1.8 Konsep Periode dalam Pentahelix

Pentahelix digunakan dalam penanganan berbagai program. Baik penanganan bencana, pengembangan potensi dan pencegahan resiko. Pentahelix diarahkan sebagai tindakan pencegahan. Resa et.al (2017) mengkaji strategi pentahelix pada penataan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. Menurutnya pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk membuat penataan kawasan kumuh semakin matang dan berkembang. Dalam perbedaan jenis keadaan kolaborasi partisipatif pentahelix akan berdampak kepada aktor yang dominan, hal ini digambarkan dalam tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.1 Dominasi Peran Aktor

	Penanganan (Masalah)	Pengembangan (Potensi)	Pencegahan (Resiko)
Pemerintah	v	v	v
Masyarakat	v	v	v
Akademisi	v	v	V
Media		v	
Swasta	v	v	

Dari beberapa jenis kolaborasi partisipatif pentahelix yang dilakukan untuk melakukan suatu tujuan, maka kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga jenis kolaborasi partisipatif pentahelix, yaitu penanganan masalah, pengembangan dan pencegahan. Dimana penanganan masalah dilakukan ketika ada masalah atau bencana yang terjadi, pengembangan dilakukan jika ada kawasan berpotensi namun perlu dikembangkan, dan pencegahan dilakukan pada kawasan yang beresiko.

2.1.9 Model Kolaborasi Berkelanjutan

Kolaborasi antar multi aktor menjadi salah satu pendorong inovasi berkelanjutan (Mariani et.al., 2022) menurutnya kolaborasi multi-stakeholder akan menghasilkan beberapa inovasi signifikan yang mendukung keberlanjutan, termasuk pengembangan teknologi baru, praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan, dan peningkatan transparansi rantai pasok. Namun, keberhasilannya tergantung pada kemampuan untuk membangun kepercayaan, mengelola hubungan yang kompleks, dan mengembangkan struktur pengelolaan yang adaptif. Mereka harus mempertimbangkan untuk memperluas kemitraan mereka dengan pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian untuk mencapai tujuan keberlanjutan

Lebih lanjut menurut (Chen et.al., 2017) faktor pendukung kolaborasi berkelanjutan ada 3 yaitu (1) Teknologi informasi dan komunikasi, (2) Kepercayaan dan komitmen jangka Panjang, (3) Regulasi dan kebijakan pemerintah. Hal ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang tren dan tantangan yang dihadapi dalam proses kolaborasi sekarang ini, meskipun terdapat juga banyak peluang yang didapatkan untuk meningkatkan keberlanjutan melalui kolaborasi.

Tantangan dalam implementasi tata kelola kolaboratif berupa kompleksitas masalah dan permasalahan kebijakan dapat membuat proses kolaboratif menjadi lebih menantang dan rentan terhadap kegagalan (Chris dan Gash, 2008) hal ini terkadang membuat proses kolaboratif sering membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pendekatan pengambilan keputusan top-down, yang dapat menjadi kendala dalam situasi di mana keputusan cepat diperlukan.

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Penerapan Pentahelix

Pentahelix dilakukan dalam kajian-kajian sebelumnya sebagai pemecahan masalah. Seperti Penanganan Penyebaran COVID 19 (Indarto dan Ratnawati,2021) dan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Sumatera Utara (Rizkiyah et.al.,2019). Ada kondisi yang sama pada kedua kasus ini, pentahelix menjadi model dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam setiap upaya penanganan bencana yang dilakukan. Maka tindakan kolaborasi dilakukan setelah bencana datang. Kolaborasi antara kelima aktor memang sangat penting, apalagi yang

menyangkut kegiatan besar dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Indarto dan Ratnawati (2021) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dengan mengandalkan kemandirian masyarakat akan lebih cepat dan berkelanjutan. Namun, ada pula perbedaan dalam kedua kasus ini, dimana Rizkiyah et.al (2019) melibatkan kawasan secara makro dan belum melibatkan masyarakat terdampak dalam penanganannya. Dalam kajian tersebut juga disarankan kepada penelitian yang akan datang bahwa melibatkan masyarakat terdampak (internal) akan lebih berpengaruh dan tepat sasaran.

Berbeda dengan kedua penerapan pentahelix diatas, Flores et.al. (2020) menerapkan pentahelix tanpa didahului oleh bencana, namun kolaborasi pentahelix dilakukan sebelum terjadi bencana (persaingan pasar) dan dalam upaya untuk membuat produksi dapat lebih kompetitif dalam dunia usaha. Hal ini akan lebih membutuhkan inovasi karena persaingan dalam dunia usaha lebih ketat. Kajian ini menyatakan justru masyarakat tidak terlalu berperan penting, karena bersifat menerima dan mendukung program yang ada, menurutnya tidak bisa mengubah produk yang ada. Karena produk baja menurutnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat setempat.

Ansell & Gash (2008) mengatakan bahwa ada empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam kolaborasi pemerintahan, yaitu kondisi awal, proses kolaboratif, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif. Muklis et.al. (2024) memakai konsep ini dalam mengkaji AMDAL di Cirebon. Menurutnya kolaborasi dalam penyusunan kajian AMDAL di Cirebon tersebut belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Walaupun kondisi awal dan proses kolaborasi sudah cukup baik, namun pada desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif masih menjadi hambatan. Maka dari situ menunjukkan bahwa desain kelembagaan dalam keterlibatan seluruh aktor pentahelix dan dukungan fasilitasi dari pemerintah sangat diperlukan untuk kesuksesan kolaborasi.

Sebenarnya ada yang lebih menantang dalam kajian Flores (2020), dimana masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam persaingan produksi baja. Karena masyarakat sebagai konsumen atau pemakai merupakan tujuan akhir sebuah usaha, maka pentahelix dalam produksi baja dapat diarahkan terhadap keinginan pasar.

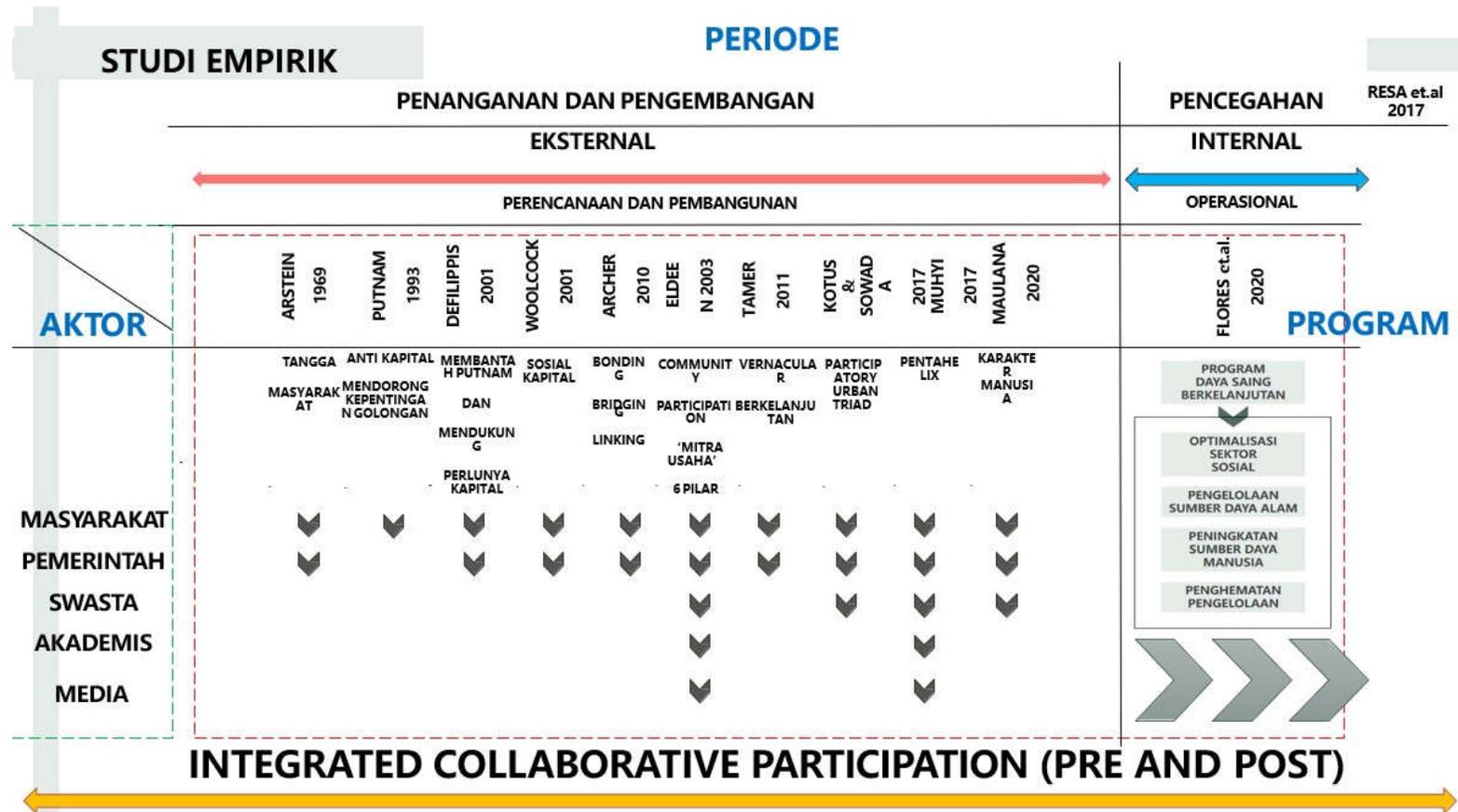
2.2.2 Kegagalan Penerapan Kolaborasi Pentahelix

Kegagalan Kolaborasi disebabkan oleh banyak faktor, Gray (1989) menyatakan kolaborasi dapat dioptimalkan dengan memperhatikan empat hal, yaitu Ketergantungan, Kekompakan, Keterikatan Keputusan dan Keterikatan Tanggung Jawab. Indarto dan Ratnawati (2021) menambahkan kolaborasi yang gagal diakibatkan oleh adanya kurangnya koordinasi, kurangnya kepedulian dan kurangnya kontribusi antar aktor.

Namun demikian, apa yang dikemukakan Gray fokus kepada aktor kolaborasinya saja. Sedangkan kolaborasi tidak bisa berjalan dengan singkat (Muhyi, 2017), kolaborasi harus terjalin dalam jangka panjang. Walaupun setelah tujuan kolaborasi dapat ditangani dengan baik, kolaborasi tetap terjalin sejak dari masa penanganan masalah, pengembangan potensi sampai pencegahan resiko (Resa, 2021).

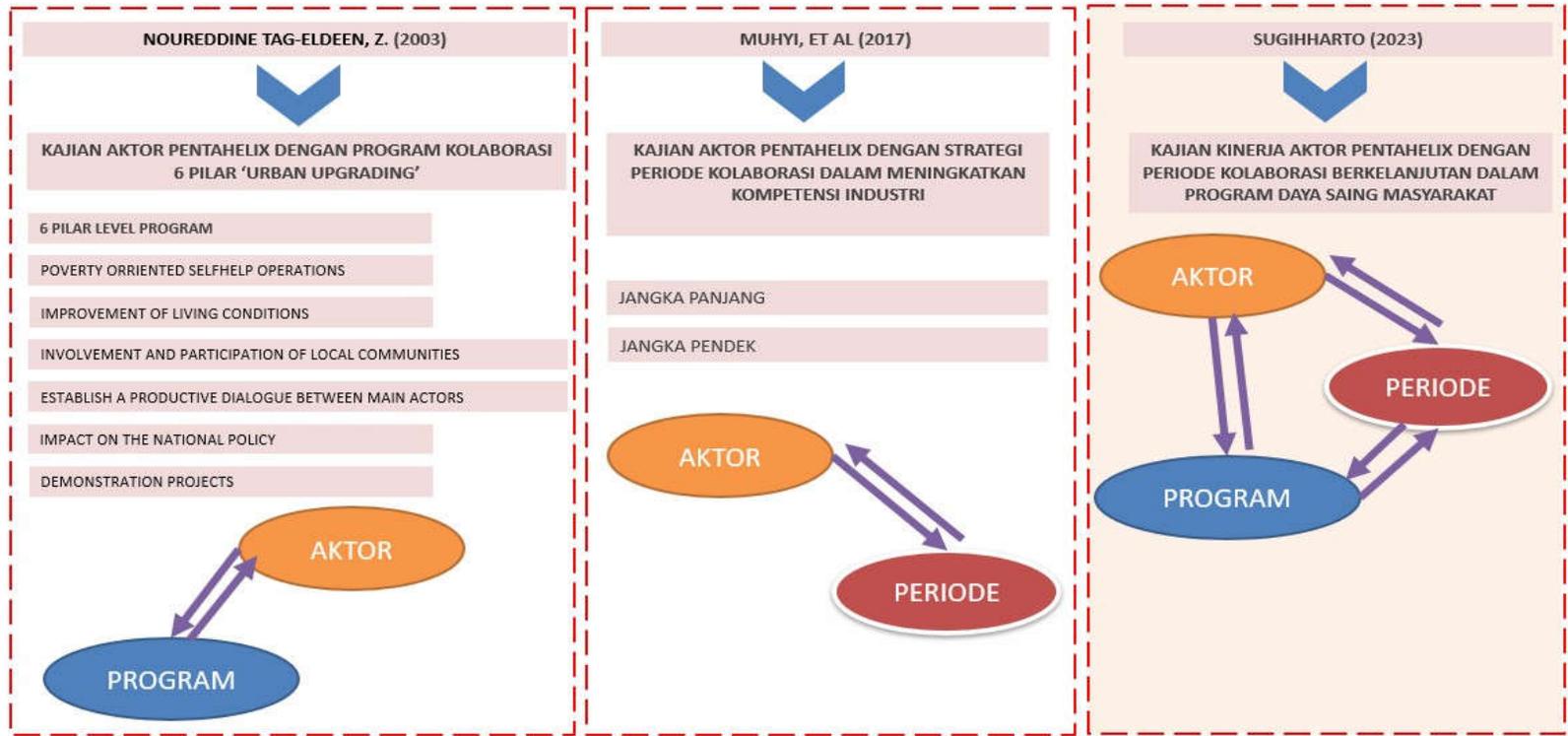
Selain aktor dan periode kolaborasi, program yang dilakukan juga perlu diperhatikan. Dalam Konsep Participatory Urban Upgrading (Eldeen, 2003) meningkatkan taraf hidup perkotaan dengan 6 pilar, yaitu usaha mandiri, perkembangan lingkungan, keterlibatan komunitas, konektifitas, kebijakan Pemerintah dan adanya percontohan sebagai tolak ukur. Maka usaha mandiri ini adalah mengacu pada program yang membuat masyarakat yang dapat hidup mandiri dan berdaya saing.

Dalam upaya peningkatan daya saing, ada beberapa faktor yang mempengaruhi (Flores, 2020), yaitu social capital, nature capital, intellectual capital dan efficiency governance. Dengan adanya upaya peningkatan daya saing masyarakat, diharapkan terlaksananya kemandirian masyarakat dapat mencegah kawasan kumuh baru.



Gambar 2.6 Pemetaan Penelitian Pentahelix Terdahulu
 Sumber : Hasil Analisis Penulis (2024)

NOVELTY/KEBARUAN/STATE OF THE ART



Gambar 2.7 State of The Art
Sumber : Hasil Analisis Penulis (2024)